Kritik Sosial Iwan Fals pada Masa Orde Baru dan Relasi Kekuasaan Pemerintahan Presiden Prabowo

Iwan Fals' Social Criticism during the New Order Era and Power Relations in President Prabowo's Government

Ainun Faroziya[a,1*], Siti Rumilah[b,2]

[ab]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,Surabaya, Indonesia
Jl. Ahmad Yani No.117, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, 60237
faroziyaainun@gmail.com, rumilah@uinsa.id
* Penulis Korespondensi

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 16 September 2026
Direvisi: 14 Oktober 2026
Disetujui: 21 Oktober 2026

Keywords
Social criticism
Power relations
Critical Discourse Analysis (CDA)
Hegemony
wan Fals

Kata Kunci
kritik sosial
relasi kekuasaan
Análisis Wacana Kritis
hegemoni
wan Fals

ABSTRAK

Abstract
This study aims to analyze the linguistic and discursive strategies in four songs by Iwan Fals: Ujung Aspal Pondok Gede, Kuda Lumping, Sumbang, and Asyik Nggak Asyik, as well as their interconnected representations of social inequality and power relations. This study employs a descriptive qualitative approach using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis, which encompasses the dimensions of text, discursive practice, and sociocultural practice, alongside Antonio Gramsci's theory of hegemony. The data consist of relevant lyrical units analyzed comparatively. The findings reveal that the four songs address interconnected issues, including the loss of living spaces, cultural marginalization, socio-ecological inequality, and political interests. These issues are expressed through metaphors, irony, personification, cultural symbols, repetition, satire, and rhetorical questions. Overall, the songs construct a critique of unequal power relations. From Gramsci's perspective, this critique can be interpreted as a counter-hegemonic discourse. Iwan Fals's works also provide a critical lens for examining contemporary power relations in Indonesia without equating the political contexts of the New Order and the present.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kebahasaan dan wacana dalam empat lagu Iwan Fals, yaitu "Ujung Aspal Pondok Gede", "Kuda Lumping", "Sumbang", dan "Asyik Nggak Asyik", serta keterhubungannya dalam merepresentasikan ketimpangan sosial dan relasi kekuasaan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough melalui dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural, serta perspektif hegemoni Antonio Gramsci. Data berupa teks lirik dianalisis secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat lagu mengangkat persoalan hilangnya ruang hidup, marginalisasi kebudayaan, ketimpangan sosial-ekologis, dan kepentingan politik melalui metafora, ironi, personifikasi, simbol budaya, repetisi, satire, dan pertanyaan retoris. Secara keseluruhan lagu tersebut membentuk kritik terhadap ketimpangan relasi kekuasaan. Dalam perspektif Gramsci, kritik tersebut merupakan wacana tandingan terhadap dominasi. Karya Iwan Fals juga relevan sebagai lensa kritis untuk membaca relasi kekuasaan kontemporer tanpa menyamakan konteks Orde Baru dan masa kini.

1. Pendahuluan

Lirik lagu Iwan Fals pada era 1980-an menghadirkan kritik terhadap berbagai persoalan sosial, mulai dari perubahan ruang hidup masyarakat, marginalisasi kelompok tertentu, ketimpangan sosial, hingga relasi antara rakyat dan kekuasaan. Persoalan tersebut tampak dalam lagu "Ujung Aspal Pondok Gede", "Kuda Lumping", "Sumbang", dan "Asyik Nggak Asyik" yang merepresentasikan kritik sosial melalui tema dan strategi kebahasaan yang berbeda. Keempat lagu ini menjadi objek kajian untuk ditelaah bagaimana bahasa digunakan dalam membangun representasi ketimpangan sosial dan relasi kekuasaan. Karya-karya Iwan Fals yang merepresentasikan kritik sosial dalam konteks perubahan sosial-politik Indonesia menjadi salah satu bentuk ekspresi budaya yang kuat dalam menyuarakan persoalan sosial dan kritik terhadap kondisi masyarakat pada masa Orde Baru (Primasanti, 2017).

Secara tematik, "Ujung Aspal Pondok Gede" merepresentasikan perubahan ruang hidup masyarakat akibat pembangunan dan marginalisasi kelompok masyarakat perkotaan. "Kuda Lumping" menggunakan simbol kesenian rakyat untuk menggambarkan eksploitasi, penindasan, serta posisi rakyat kecil yang terjepit dalam relasi kekuasaan. "Sumbang" mengkritik perilaku elite politik, kesenjangan kelas, dan dominasi penguasa terhadap rakyat. Sementara itu, "Asyik Nggak Asyik" menghadirkan kritik terhadap dinamika kepentingan dalam kehidupan sosial-politik serta posisi masyarakat dalam relasi kekuasaan. Perbedaan tema tersebut menjadikan keempat lagu relevan dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi pola kritik sosial dan strategi kebahasaan yang digunakan dalam merepresentasikan ketimpangan serta relasi antara rakyat dan penguasa.

Dalam perspektif Gramsci, hegemoni tidak hanya berlangsung melalui penggunaan kekerasan atau paksaan, tetapi juga melalui pembentukan persetujuan (*consent*) dan penerimaan terhadap nilai serta pandangan yang mendukung dominasi kelompok tertentu (1971). Kebudayaan dapat menjadi ruang berlangsungnya hegemoni sekaligus tempat munculnya perlawanan terhadap dominasi tersebut. Dalam konteks ini, musik populer berpotensi menjadi medium wacana tandingan ketika menyuarakan pengalaman kelompok yang mengalami ketimpangan atau marginalisasi. Namun, keberadaan kritik dalam lirik tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya perlawanan yang efektif; makna dan potensinya perlu ditelaah melalui bukti tekstual dan konteks sosialnya (Susanti & Nurmayani, 2020) .

Untuk mengkaji hubungan antara bahasa dan kekuasaan tersebut, penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough. Fairclough (1995) memandang bahasa sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan ideologi dan relasi kekuasaan. Dengan demikian, pilihan kata, metafora, struktur kalimat, serta representasi aktor sosial dalam lirik dapat dianalisis untuk memahami bagaimana suatu realitas sosial dibentuk dan dimaknai. Kerangka Fairclough digunakan untuk mengkaji tiga dimensi, yaitu teks (*text*), praktik diskursif (*discourse practice*), dan praktik sosiokultural (*sociocultural practice*), sedangkan perspektif Gramsci digunakan untuk menafsirkan dominasi, pembentukan persetujuan, dan kemungkinan hadirnya wacana tandingan.

Konteks Orde Baru penting untuk memahami kemunculan lagu-lagu tersebut karena pembangunan, stabilitas politik, dan pengaturan kehidupan sosial merupakan bagian dari dinamika pemerintahan pada periode itu (Mayrudin & Nurul, 2017; Pratikno, 1998) . Persoalan perubahan ruang hidup, hubungan antara rakyat dan elite, serta kritik terhadap perilaku kekuasaan dalam lagu-lagu Iwan Fals dapat dibaca dalam kaitannya dengan kondisi sosial-politik tersebut. Meskipun demikian, interpretasi atas setiap lagu perlu

didasarkan pada bukti lirik dan didukung oleh sumber historis yang relevan agar konteks zaman tidak semata-mata diasumsikan dari tema lagu.

Penelitian terdahulu telah membahas sejumlah aspek yang relevan dengan kajian ini. Hidayat, mengkaji penggunaan gaya bahasa metonimia dalam lirik lagu Iwan Fals sebagai salah satu bentuk penyampaian kritik sosial (Hidayat, 2022) . Sembiring membahas representasi kehidupan masyarakat dan pembangunan dalam lagu "Ujung Aspal Pondok Gede" (Sembiring, 2013) . Sementara itu, Aminuddin et al. mengkaji hubungan antara wacana, bahasa, dan kekuasaan melalui Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dengan memperhatikan dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural (2025) . Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami kritik sosial dalam lirik lagu dan penggunaan awk, tetapi memiliki fokus objek dan analisis yang berbeda.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya menelaah satu lagu atau menyoroti aspek kebahasaan tertentu, penelitian ini secara komparatif menganalisis empat lagu Iwan Fals era 1980-an, yaitu "Ujung Aspal Pondok Gede", "Kuda Lumping", "Sumbang", dan "Asyik Nggak Asyik". Celah penelitian terletak pada minimnya kajian yang menghubungkan ke empat lagu tersebut dalam satu kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough dan perspektif hegemoni Gramsci untuk memetakan pola kritik sosial, strategi kebahasaan, serta representasi aktor sosial.

Relevansi kontemporer dibahas dengan mempertimbangkan dinamika relasi antara pemerintah dan masyarakat di Indonesia setelah reformasi, khususnya pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isu pengentasan kemiskinan, kesejahteraan rakyat, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi publik menjadi konteks yang relevan untuk menelaah daya analitis kritik sosial dalam lagu-lagu Iwan Fals. Pemerintahan Prabowo menempatkan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sebagai agenda kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang menekankan peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran, serta penanganan kantong-kantong kemiskinan (Kementerian Sekretariat Negara, 2025). Namun, persoalan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kesinambungan pola kekuasaan Orde Baru. Oleh karena itu, pembahasan dilakukan secara kritis dengan membedakan konteks historis kedua periode serta menggunakan sumber yang dapat diverifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pilihan bahasa, metafora, dan representasi aktor sosial dalam lagu "Ujung Aspal Pondok Gede", "Kuda Lumping", "Sumbang", dan "Asyik Nggak Asyik" dalam merepresentasikan ketimpangan sosial dan relasi kekuasaan; (2) mengidentifikasi pola kritik sosial yang menghubungkan ke empat lagu, terutama terkait marginalisasi masyarakat, ketimpangan, perilaku elite, dan hubungan antara rakyat dan penguasa berdasarkan bukti tekstual; serta (3) membahas relevansi analitis kritik sosial dalam keempat lagu terhadap dinamika relasi negara dan masyarakat pada pemerintahan kontemporer Indonesia, khususnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tetap membedakannya dari konteks historis Orde Baru.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough. Pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti

berfokus pada penafsiran makna, representasi, ideologi, serta relasi kekuasaan yang terdapat dalam teks lirik lagu. AWK dipilih karena memungkinkan peneliti menghubungkan unsur kebahasaan dalam teks dengan praktik produksi dan konsumsi wacana serta kondisi sosial-politik yang melatarbelakanginya. Model Fairclough memandang wacana melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural 1995).

Objek penelitian ini adalah empat lagu karya Iwan Fals era 1980-an, yaitu "Ujung Aspal Pondok Gede", "Kuda Lumping", "Sumbang", dan "Asik Nggak Asik". Pemilihan keempat lagu dilakukan secara purposif karena memiliki muatan kritik sosial dan merepresentasikan persoalan ketimpangan, marginalisasi masyarakat, perilaku elit, kepatuhan sosial, serta relasi antara masyarakat dan kekuasaan. Keempat lagu dianalisis sebagai satu kesatuan wacana untuk menemukan keterhubungan tema dan pola relasi kekuasaan di dalamnya.

Data utama penelitian adalah teks lirik berupa kata, frasa, kalimat, dan bait yang mengandung diksi, metafora, simbol, ironi, sindiran, repetisi, pertanyaan retoris, struktur kalimat, serta representasi aktor sosial. Data tidak berupa keseluruhan lagu, melainkan bagian lirik yang relevan dengan fokus penelitian tentang ketimpangan dan relasi kekuasaan.

Sumber data utama adalah teks lirik dari empat lagu tersebut yang diperoleh melalui *YouTube.* Teks lirik "Ujung Aspal Pondok Gede" diperoleh dari video musik resmi Iwan Fals di kanal *YouTube* resminya, yang mencantumkan Iwan Fals sebagai penulis lagu dan lirik (2019) . Teks lirik "Kuda Lumping" dan "Asik Nggak Asik" diperoleh dari video karaoke resmi Iwan Fals di *YouTube*, yang juga mencantumkan Iwan Fals sebagai penulis lagu dan lirik (1991; 2004) . Sementara itu, teks lirik "Sumbang" diperoleh dari kanal *YouTube* @musica klasik (Iwan Fals, 1983). Seluruh teks lirik kemudian diverifikasi dengan mendengarkan rekaman audio lagu secara berulang untuk memastikan kesesuaian antara teks yang digunakan dan rekaman lagu.

Data pendukung diperoleh melalui studi pustaka, meliputi buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dokumen sejarah, dan sumber kredibel mengenai kondisi sosial-politik Indonesia pada masa Orde Baru serta dinamika pemerintahan kontemporer. Data kontemporer digunakan secara selektif sebagai konteks pembanding, khususnya mengenai kepemimpinan, pengambilan keputusan, birokrasi, hubungan pemerintah dengan masyarakat, dan respons pemerintah terhadap opini publik di media sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka dengan tahapan berikut:

1) Mengumpulkan teks lirik "Ujung Aspal Pondok Gede", "Kuda Lumping", "Sumbang", dan "Asik Nggak Asik" dari YouTube.
2) Mencatat nama kanal *YouTube*, judul video, serta tautan video sebagai identitas sumber data.
3) Memverifikasi setiap teks lirik dengan mendengarkan rekaman audio atau menonton video secara berulang.
4) Membaca keempat lirik secara berulang untuk memahami tema, suara penutur, situasi sosial yang digambarkan, dan pesan kritis dalam teks.
5) Menandai bagian lirik yang memuat diksi, metafora, simbol, ironi, sindiran, repetisi, pertanyaan retoris, struktur kalimat, serta representasi rakyat dan penguasa.
6) Menyusun tabel data yang memuat judul lagu, kutipan lirik, lokasi bait atau baris, jenis fitur kebahasaan, dan catatan interpretasi awal.
7) Mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti marginalisasi masyarakat, pembangunan, penundukan massa, ketimpangan sosial, perilaku elit, kepatuhan, dan relasi rakyat dengan penguasa.

8) Mengumpulkan sumber pendukung mengenai konteks sosial-politik Orde Baru dan fenomena kepemimpinan kontemporer yang relevan dengan kategori analisis.

Analisis data dilakukan secara bertahap sesuai tiga dimensi awk Fairclough. Ketiga dimensi tersebut dianalisis secara berkesinambungan agar makna tekstual dapat dihubungkan dengan praktik wacana dan konteks sosial-politik (Fairclough, 1995) .

Pertama, analisis teks. Peneliti mengidentifikasi pilihan kata atau diksi, metafora, simbol, ironi, sindiran, repetisi, pertanyaan retoris, struktur kalimat, serta cara rakyat dan penguasa direpresentasikan. Pada tahap ini, peneliti menjawab pertanyaan: fitur bahasa apa yang digunakan dan makna lokal apa yang dibangun oleh fitur tersebut?

Kedua, analisis praktik diskursif. Peneliti menafsirkan proses produksi, penyebaran, dan konsumsi lagu sebagai wacana kritik sosial. Aspek yang dianalisis meliputi posisi Iwan Fals sebagai penyanyi-penulis lagu, konteks album dan periode rilis, media penyebaran lagu pada era 1980-an, serta cara lagu dikonsumsi oleh pendengar. Pada tahap ini, peneliti menjawab pertanyaan: siapa yang memproduksi wacana, melalui media apa wacana itu disebarkan, dan bagaimana wacana itu berpotensi diterima oleh masyarakat?

Ketiga, analisis praktik sosiokultural. Peneliti menghubungkan temuan tekstual dan praktik diskursif dengan kondisi sosial, budaya, dan politik, khususnya Orde Baru. Aspek yang dianalisis meliputi pembangunan, ketimpangan, marginalisasi, kontrol sosial, serta relasi kekuasaan antara negara, elit, dan masyarakat (Fairclough, 1995) .

Teori hegemoni Gramsci digunakan sebagai kerangka interpretasi temuan, bukan sekadar teori yang disebutkan. Konsep hegemoni digunakan untuk membaca bagaimana kelompok dominan mempertahankan kekuasaan melalui pembentukan konsensus, nilai, dan kepatuhan sosial (Gramsci, 1971). Konsep kontra-hegemoni digunakan untuk membaca bagaimana lirik Iwan Fals membangun kesadaran kritis, menampilkan ketimpangan, mengangkat suara kelompok terpinggirkan, dan menantang narasi dominan.

Sebagai contoh, apabila lirik menggambarkan rakyat sebagai kelompok yang kehilangan tanah karena kepentingan pembangunan, temuan tersebut dianalisis sebagai representasi marginalisasi. Representasi itu kemudian dibaca sebagai bentuk kontra-hegemoni apabila lirik memperlihatkan bahwa ketimpangan bukan keadaan alamiah, melainkan hasil relasi kekuasaan yang dapat dipertanyakan.

Setelah ketiga dimensi dianalisis, penelitian mengidentifikasi pola relasi kekuasaan yang muncul dalam keempat lagu. Pola tersebut kemudian digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk membaca dinamika relasi kekuasaan dalam pemerintahan kontemporer. Perbandingan dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan perbedaan sistem politik, ruang partisipasi publik, serta perkembangan media dan teknologi komunikasi antara masa Orde Baru dan masa kini.

Perbandingan difokuskan pada hubungan pemerintah dan masyarakat, proses pengambilan keputusan, posisi masyarakat dalam kebijakan pembangunan, distribusi manfaat dan dampak kebijakan, serta pertarungan wacana di ruang publik. Data pemerintahan kontemporer berfungsi sebagai konteks pembanding, bukan bukti bahwa pola kekuasaan Orde Baru berlangsung secara identik pada masa sekarang.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan teks lirik dari video YouTube yang digunakan dengan rekaman audio lagu, serta membandingkan informasi kontekstual dari buku, artikel jurnal, dan dokumen sejarah. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan AWK Fairclough untuk menganalisis bahasa dan praktik wacana, lalu teori hegemoni Gramsci untuk menafsirkan relasi kekuasaan, dominasi, kepatuhan, dan kontra-hegemoni. Dengan demikian, interpretasi tidak hanya bertumpu pada aspek kebahasaan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan relasi kekuasaan.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menjelaskan bagaimana bahasa dalam keempat lagu Iwan Fals merepresentasikan ketimpangan dan relasi kekuasaan pada era 1980-an, serta bagaimana wacana tersebut dapat digunakan sebagai lensa kritis lintas zaman dalam membaca dinamika kepemimpinan pemerintahan kontemporer.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Wacana Kritis terhadap Empat Lagu Iwan Fals

Hasil analisis menunjukkan bahwa *"Ujung Aspal Pondok Gede"*, *"Kuda Lumping"*, *"Sumbang"*, dan *"Asyik Nggak Asyik"* menghadirkan kritik sosial melalui persoalan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menggambarkan relasi antara masyarakat dan kekuasaan. Kritik tersebut tidak selalu disampaikan secara langsung melalui bahasa politik, melainkan melalui pengalaman sehari-hari, simbol budaya, metafora, ironi, personifikasi, repetisi, dan pertanyaan retoris.

Keempat lagu memperlihatkan bahwa persoalan yang dialami masyarakat tidak berdiri sendiri. *"Ujung Aspal Pondok Gede"* menampilkan hilangnya ruang hidup akibat pembangunan; *"Kuda Lumping"* menggambarkan keterdesakan masyarakat dan marginalisasi kebudayaan; *"Sumbang"* memperlihatkan persoalan lingkungan serta ketimpangan dalam distribusi dampak pembangunan; sedangkan *"Asyik Nggak Asyik"* mengarahkan kritik pada permainan kepentingan politik dan posisi masyarakat di dalamnya.

Untuk melihat bagaimana kritik tersebut dibangun, analisis dilakukan melalui tiga dimensi analisis wacana kritis Norman Fairclough, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural. Analisis kemudian diperdalam dengan perspektif hegemoni Antonio Gramsci untuk melihat bagaimana dominasi, kepatuhan, dan penerimaan terhadap kondisi sosial direpresentasikan serta bagaimana ke empat lagu menghadirkan wacana tandingan (*counter-hegemony*).

3.1.1 "Ujung Aspal Pondok Gede"

3.1.1.1 Dimensi Teks

"Ujung Aspal Pondok Gede" merepresentasikan persoalan pembangunan dan hilangnya ruang hidup masyarakat melalui penggunaan bahasa yang bersifat personal, simbolik, dan kontras. Pada tingkat teks, penggunaan kata ganti orang pertama dalam ungkapan "Di kamar ini, aku dilahirkan" dan "Di rumah ini, aku dibesarkan" menunjukkan bahwa persoalan pembangunan disampaikan melalui pengalaman personal penutur. Rumah, keluarga, dusun, tanah, dan lingkungan tidak hanya menjadi latar kehidupan, tetapi juga membentuk identitas sosial masyarakat.

Representasi kehidupan masyarakat kecil diperkuat melalui penyebutan "kambing sembilan", "motor tiga", dan "ladang yang luas". Diksi tersebut menggambarkan kehidupan sederhana yang memiliki keterikatan kuat dengan ruang agraris. Ketika dinyatakan bahwa "ladang yang luas habis sudah", kehilangan yang terjadi tidak hanya berupa hilangnya sumber penghidupan, tetapi juga perubahan terhadap ruang sosial dan kehidupan masyarakat.

Ungkapan "tanah moyangku" memperlihatkan bahwa tanah memiliki dimensi historis dan kultural. Tanah tidak semata-mata diposisikan sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai ruang yang memiliki hubungan dengan leluhur dan identitas keluarga. Sebaliknya, ungkapan "tersentuh sebuah rencana" menunjukkan adanya kekuatan eksternal yang memiliki kemampuan untuk mengubah ruang tersebut.

Kritik semakin kuat melalui personifikasi dalam ungkapan "serakahnya kota" dan "angkuh tembok pabrik". Kota dan tembok pabrik diberi sifat manusia berupa keserakahan dan keangkuhan. Melalui strategi tersebut, pembangunan tidak hanya direpresentasikan sebagai kemajuan, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat menggeser

kehidupan masyarakat lokal. Terbentuk oposisi antara dusun dan kota, ladang dan pabrik, kehidupan lama dan pembangunan baru, serta masyarakat dan kepentingan pembangunan.

3.1.1.2 Praktik Diskursif

Pada dimensi praktik diskursif, lagu ini memproduksi kritik sosial melalui pengalaman masyarakat yang berhadapan dengan perubahan ruang hidup. Persoalan yang secara struktural berkaitan dengan pembangunan dan industrialisasi diterjemahkan melalui cerita mengenai rumah, tanah, keluarga, dan lingkungan. Penggunaan pengalaman sehari-hari membuat persoalan pembangunan menjadi dekat dengan pendengar.

Sebagai lagu populer, kritik tersebut tidak disampaikan melalui bahasa kebijakan atau pernyataan politik formal. Wacana pembangunan justru dipertemukan dengan pengalaman masyarakat yang mengalami dampaknya. Dengan demikian, lagu menjadi medium yang memungkinkan pengalaman kelompok masyarakat yang berada pada posisi lemah masuk ke dalam ruang konsumsi budaya masyarakat luas.

3.1.1.3 Praktik Sosiokultural

Pada dimensi praktik sosiokultural, wacana lagu berkaitan dengan perubahan ruang sosial akibat pembangunan dan industrialisasi. Pembangunan yang dalam wacana dominan sering dipahami sebagai simbol kemajuan direpresentasikan dari sudut pandang masyarakat yang mengalami kehilangan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat lokal. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik wilayah, tetapi juga dengan hilangnya ruang kehidupan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan historis bagi masyarakat.

Dalam perspektif Gramsci, representasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *counter-hegemony*. Lagu menghadirkan perspektif alternatif terhadap wacana pembangunan dominan dengan memperlihatkan bahwa pembangunan tidak selalu menghasilkan manfaat yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat.

3.1.1.4 Hegemoni dan *Counter-Hegemony*

Hegemoni dalam lagu ini tampak melalui hadirnya pembangunan sebagai kekuatan yang menentukan perubahan ruang hidup masyarakat. Masyarakat berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki kekuatan yang sama dalam menentukan arah perubahan tersebut.

Namun, lirik menghadirkan wacana tandingan dengan menjadikan pengalaman masyarakat sebagai pusat cerita. Dengan demikian, "Ujung Aspal Pondok Gede" tidak sekadar menggambarkan perubahan lingkungan, tetapi mempertanyakan siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan perubahan ruang dan siapa yang harus menanggung konsekuensinya.

3.1.2 "Kuda Lumping"

3.1.1.1 Dimensi Teks

"Kuda Lumping" menghadirkan kritik melalui simbol budaya, ironi, pertanyaan retoris, dan penggambaran kondisi masyarakat yang berada dalam situasi sulit. Ungkapan "Kuda lumping nasibnya nungging" dan "Mencari makan terpontang-panting" membangun gambaran mengenai kehidupan yang berada dalam posisi rendah dan tidak stabil.

Kuda lumping tidak hanya digunakan sebagai simbol kesenian tradisional, tetapi juga sebagai representasi masyarakat yang mengalami keterdesakan. Hal tersebut diperkuat melalui gambaran "*menari tak sadarkan diri*", "*mata terpejam*", dan "*mengunyah beling*". Aktivitas pertunjukan yang semestinya menjadi hiburan justru ditampilkan melalui tindakan yang merepresentasikan rasa sakit.

Pertanyaannya "*Sebenarnya siapa yang sinting*?" menjadi salah satu strategi penting dalam lagu. Pertanyaan tersebut membalikkan posisi antara pihak yang dianggap normal dan pihak yang dianggap tidak normal. Alih-alih memberikan jawaban, lirik mendorong pendengar untuk mempertanyakan kondisi sosial yang menjadi penyebab penderitaan yang dianggap biasa.

Ungkapan "Berbaju sutra pandai menipu" juga memperlihatkan adanya pertentangan antara penampilan dan moralitas. "Baju sutra" mengasosiasikan kemewahan dan status sosial, sedangkan "menipu" memberikan makna negatif terhadap perilaku pihak yang berada di balik penampilan tersebut. Sementara, ungkapan "*makan tanah memperkosa fakta*" memperluas kritik terhadap persoalan pengendalian realitas. Bahasa tersebut menggambarkan tindakan yang tidak hanya menempatkan masyarakat dalam posisi sulit, tetapi juga berpotensi memutarbalikkan fakta.

3.1.1.2 Praktik Diskursif

Pada dimensi praktik diskursif, simbol kuda lumping menjadi medium untuk menyampaikan kritik sosial melalui bentuk budaya yang dekat dengan masyarakat. Persoalan kemiskinan, keterdesakan, penipuan, dan ketimpangan tidak disampaikan melalui bahasa politik formal, melainkan melalui kesenian rakyat. Penggunaan simbol budaya tersebut memungkinkan persoalan sosial yang kompleks dikemas dalam bentuk yang lebih mudah diterima oleh pendengar. Kritik terhadap kondisi sosial menjadi bagian dari pengalaman budaya masyarakat, sehingga wacana perlawanan tidak harus muncul secara terbuka dan konfrontatif.

3.1.1.3 Praktik Sosiokultural

Pada tingkat praktik sosiokultural, lagu ini memperlihatkan posisi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi subordinat. Penderitaan ekonomi dan keterbatasan pilihan digambarkan melalui aktivitas kesenian yang justru menjadi tontonan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penundukan tidak selalu berlangsung melalui paksaan langsung. Penundukan dapat muncul melalui kemiskinan, keterbatasan pilihan, pengendalian fakta, serta kondisi sosial yang membuat masyarakat menerima keadaan sebagai sesuatu yang biasa. Kondisi tersebut dibangun melalui rangkaian gambaran "menari tak sadarkan diri", "mata terpejam", dan "mengunyah beling", yang menempatkan penderitaan sebagai bagian dari tontonan.

Lagu ini juga memperlihatkan persoalan perubahan kebudayaan melalui ungkapan "pelan-pelan ditelan zaman". Tradisi dipersonifikasikan sebagai sesuatu yang hidup, tetapi berada dalam ancaman perubahan zaman.

3.1.1.4 Hegemoni dan *Counter-Hegemony*

Dalam perspektif Gramsci, *Kuda Lumping* dapat dibaca sebagai bentuk *counter-hegemony* karena menggunakan budaya populer untuk mempertanyakan kondisi sosial yang telah dinormalisasi. Kesenian rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk menyuarakan pengalaman kelompok yang terpinggirkan. Kritik dalam lagu ini memperlihatkan bahwa dominasi dapat bekerja melalui kondisi sosial yang membuat masyarakat terbiasa dengan penderitaan. Wacana tandingan muncul ketika lirik mengubah kondisi tersebut menjadi objek pertanyaan dan kritik.

3.1.3 "Sumbang"

3.1.1.1 Dimensi Teks

"Sumbang" membangun kritik melalui ironi, repetisi, personifikasi, serta pengelompokan aktor berdasarkan kepemilikan kendaraan. Ungkapan "*Sumbang senandung mesin-mesin di setiap jalanan*" memperlihatkan ironi karena kata "*senandung*",

yang biasanya berkaitan dengan suara yang indah, justru digunakan untuk menggambarkan suara mesin.

Repetisi kata "peduli" memperkuat ajakan untuk melihat persoalan lingkungan sebagai masalah bersama. Pengulangan tersebut tampak pada rangkaian "Peduli mobil angkutan", "Peduli mobil pejabat", "Peduli motor pribadi", dan "Peduli motor instansi". Repetisi itu tidak hanya menegaskan banyaknya sumber polusi, tetapi juga membentuk daftar aktor yang terlibat dalam persoalan lingkungan. Dengan menyebut berbagai kelompok secara berurutan, lirik menunjukkan bahwa tanggung jawab atas kerusakan lingkungan tidak dapat dilemparkan hanya kepada satu pihak.

Selain itu, penyebutan kendaraan milik angkutan, pejabat, pribadi, instansi, swasta, negara, hingga "rakyat jelata" menunjukkan adanya pembedaan posisi sosial berdasarkan kepemilikan dan akses terhadap sumber daya. Frasa "Peduli swasta punya", "Peduli milik negara", "Peduli ijin tak punya", dan "Peduli milik rakyat jelata" memperlihatkan bahwa polusi bersumber dari kelompok dengan akses dan kekuatan yang berbeda. Namun, kedudukan "rakyat jelata" pada akhir rangkaian menegaskan bahwa masyarakat kecil tetap terlibat dalam persoalan tersebut meskipun tidak memiliki kekuatan setara dengan negara, swasta, atau pejabat.

Personifikasi polusi melalui ungkapan "mengembangkan sayap", "semakin merajalela", "bertambah brutal", dan "bertambah liar" menjadikan polusi seolah-olah merupakan kekuatan yang terus berkembang dan sulit dikendalikan. Dengan demikian, persoalan lingkungan diposisikan sebagai persoalan sosial yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Ungkapan "milik rakyat jelata" juga memperlihatkan konstruksi kelompok sosial. Masyarakat tidak diposisikan dalam kategori yang homogen, tetapi berada dalam struktur sosial yang memiliki perbedaan akses dan kepemilikan.

3.1.1.2 Praktik Diskursif

Pada dimensi praktik diskursif, persoalan lingkungan dikemas melalui bahasa sehari-hari yang dekat dengan pengalaman pendengar. *Kendaraan, asap, mesin, dan jalanan* menjadi media untuk membicarakan persoalan yang lebih luas mengenai pembangunan, kepemilikan, dan dampak lingkungan. Strategi tersebut membuat persoalan ekologis tidak hanya diproduksi sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan kepentingan kelompok yang berbeda.

3.1.1.3 Praktik Sosiokultural

Pada dimensi praktik sosiokultural, *"Sumbang"* menggambarkan bahwa dampak pembangunan dan aktivitas ekonomi tidak selalu diterima secara merata. Kelompok yang memiliki kendaraan, industri, atau sumber daya berada dalam posisi berbeda dengan masyarakat yang menerima dampak polusi. Persoalan lingkungan berkaitan dengan relasi kekuasaan, *siapa yang memiliki sumber daya, siapa yang menentukan penggunaannya, dan siapa yang menanggung konsekuensi dari aktivitas tersebut.*

3.1.1.4 Hegemoni dan *Counter-Hegemony*

Dalam perspektif Gramsci, kritik tersebut dapat dipahami sebagai *counter-hegemony* terhadap pandangan yang menempatkan pembangunan dan aktivitas ekonomi sebagai sesuatu yang selalu positif. Lagu menghadirkan sisi lain berupa dampak sosial dan ekologis yang dialami masyarakat. Wacana tandingan tersebut memperluas kritik Iwan Fals dari persoalan sosial-politik menuju persoalan keadilan ekologis. Dengan demikian, lingkungan menjadi salah satu ruang tempat ketimpangan dan relasi kekuasaan dapat dibaca.

3.1.4 "Asyik Nggak Asyik"

3.1.1.1 Dimensi Teks

"Asyik Nggak Asyik" menghadirkan kritik politik melalui humor, ironi, satire, dan metafora permainan. Ungkapan "*Dunia politik penuh dengan intrik*" secara langsung menggambarkan politik sebagai ruang yang dipenuhi kepentingan dan strategi. Politik kemudian dibandingkan dengan pacaran dan permainan adu jangkrik. Perbandingan tersebut menjadikan dunia politik lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari sekaligus mengurangi kesan formalitas politik.

Representasi posisi rakyat tampak dalam ungkapan "Rakyat nonton jadi suporter". Kata "nonton" dan "suporter" menempatkan rakyat sebagai pihak yang berada di luar arena permainan. Bahkan, posisi tersebut tetap berlangsung ketika rakyat mengetahui adanya persoalan dalam perilaku aktor politik. Kondisi tersebut diperkuat melalui ungkapan "Walau tahu jagoannya ngibul" dan "Walau tahu dapur nggak ngebul". Rakyat tidak digambarkan sama sekali tidak mengetahui persoalan politik, tetapi tetap ditempatkan sebagai pihak yang memberikan dukungan. Hal ini memperlihatkan bentuk kepatuhan yang tidak hanya bersumber dari ketidaktahuan, melainkan juga dari posisi rakyat yang terbatas dalam memengaruhi jalannya permainan politik.

Metafora permainan catur muncul melalui unsur "pion", "menteri", "kuda", "benteng", dan "raja". Metafora tersebut dibangun melalui bait "Seperti orang main catur", "Pion bingung nggak bisa mundur", "Pion-pion nggak mungkin kabur", "Menteri, luncur, kuda, dan benteng", serta "Raja tenang gerak selangkah". Dalam catur, pion memiliki gerak paling terbatas dan mudah dikorbankan, sedangkan menteri, kuda, benteng, dan raja memiliki peran serta kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian, metafora tersebut memperlihatkan politik sebagai struktur berjenjang: rakyat ditempatkan seperti pion yang geraknya terbatas, sementara elite politik berada pada posisi yang lebih bebas menentukan arah permainan.

3.1.1.2 Praktik Diskursif

Pada dimensi praktik diskursif, kritik politik dikemas dengan bahasa yang ringan, humoris, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Politik tidak dijelaskan menggunakan bahasa kelembagaan, melainkan melalui permainan, pacaran, dan hubungan antara pemain dan penonton. Strategi tersebut membuat kritik terhadap perilaku politik lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Kritik dapat hadir sebagai hiburan sekaligus membuka ruang refleksi terhadap perilaku aktor politik dan posisi masyarakat.

3.1.1.3 Praktik Sosiokultural

Pada dimensi praktik sosiokultural, lagu merepresentasikan politik sebagai ruang perebutan kepentingan. Rakyat digambarkan hadir dalam proses politik, tetapi belum memiliki kemampuan yang sama dengan mereka yang berkuasa di politik untuk menentukan arah permainan. Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat dapat berubah menjadi dukungan terhadap aktor politik tanpa disertai kemampuan yang seimbang untuk menentukan keputusan. Hingga muncul pertanyaan tentang kualitas hubungan antara masyarakat dan kekuasaan.

3.1.1.4 Hegemoni dan *Counter-Hegemony*

Dalam perspektif Gramsci, lagu ini memperlihatkan bagaimana konsensus dapat terbentuk ketika masyarakat tetap menjadi bagian dari permainan politik meskipun menyadari adanya persoalan. Kritik lagu kemudian bekerja dengan membongkar posisi tersebut melalui satire dan metafora permainan. "Asyik Nggak Asyik" menjadi bentuk *counter-hegemony* karena mengubah politik yang biasanya dipahami melalui bahasa formal menjadi objek kritik yang dapat dipertanyakan oleh masyarakat.

3.2 Keterhubungan Keempat Lagu dalam Membentuk Narasi Kritik Sosial

Hasil analisis terhadap "Ujung Aspal Pondok Gede", "Kuda Lumping", "Sumbang", dan "Asyik Nggak Asyik" menunjukkan bahwa kritik sosial Iwan Fals tidak hadir sebagai

persoalan yang berdiri sendiri. Keempat lagu membangun rangkaian wacana yang memperlihatkan bagaimana masyarakat berhadapan dengan kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang memiliki kemampuan lebih besar dalam menentukan kehidupan mereka. Meskipun objek kritik setiap lagu berbeda, terdapat pola yang konsisten, yaitu ketidakseimbangan antara pihak yang memiliki kuasa untuk menentukan dan pihak yang harus menerima konsekuensi dari keputusan tersebut.

"Ujung Aspal Pondok Gede" menjadi titik awal dari rangkaian tersebut melalui persoalan ruang hidup. Kehilangan rumah, tanah, dan ladang menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga dapat menggeser posisi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterikatan dengan ruang tersebut. Kritik kemudian bergerak pada "Kuda Lumping", yang memperlihatkan masyarakat dalam kondisi terdesak melalui gambaran kemiskinan, penderitaan, dan marginalisasi kesenian rakyat. Jika "Ujung Aspal Pondok Gede" memperlihatkan bagaimana ruang hidup dapat dikuasai oleh kekuatan yang lebih besar, "Kuda Lumping" memperlihatkan konsekuensi sosial ketika masyarakat berada dalam posisi yang memiliki pilihan terbatas.

Persoalan tersebut kemudian meluas dalam "Sumbang" dari persoalan masyarakat menuju persoalan sosial-ekologis. Melalui gambaran kendaraan, mesin, dan polusi, lagu menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan dan ekonomi tidak menghasilkan dampak yang sama bagi semua kelompok. Di sini, kritik tidak hanya mempertanyakan keberadaan pembangunan, tetapi juga distribusi manfaat dan dampaknya. Dengan demikian, muncul persoalan keadilan: pihak mana yang memiliki sumber daya dan memperoleh keuntungan, serta kelompok mana yang harus menanggung akibatnya.

Rangkaian kritik tersebut mencapai ranah politik dalam "Asyik Nggak Asyik". Metafora permainan memperlihatkan politik sebagai arena yang memiliki aturan, pemain, dan posisi yang tidak setara. Rakyat ditempatkan sebagai pihak yang menyaksikan permainan, sementara aktor politik berada di dalam arena dan memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan arah permainan. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang sebelumnya muncul dalam bentuk penguasaan ruang, keterdesakan masyarakat, dan ketimpangan dampak pembangunan pada akhirnya berkaitan dengan persoalan yang lebih mendasar, yaitu siapa yang memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan dan siapa yang hanya menerima akibatnya.

Dengan demikian, keterhubungan keempat lagu dapat dipahami sebagai pola kritik yang bergerak dari persoalan ruang hidup, berlanjut pada keterdesakan masyarakat, kemudian berkembang menjadi persoalan ketimpangan sosial-ekologis, dan berujung pada kritik terhadap permainan kekuasaan. Pola tersebut bukan berarti keempat lagu secara eksplisit merupakan satu rangkaian, melainkan keterhubungan tematik yang ditemukan melalui proses analisis.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dalam ke empat lagu tidak selalu direpresentasikan melalui figur pemerintah atau pejabat. Kekuasaan juga muncul melalui kemampuan untuk menentukan penggunaan ruang, menguasai sumber daya, memengaruhi kehidupan masyarakat, menentukan distribusi dampak, serta mengatur atau memengaruhi arah permainan politik. Dengan kata lain, kritik Iwan Fals tidak hanya mempertanyakan siapa yang berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan bekerja dan terhadap siapa dampaknya diarahkan.

Dalam kerangka Fairclough, pola tersebut memperlihatkan bahwa bahasa dalam lirik berfungsi sebagai praktik sosial. Pengalaman yang tampak sederhana seperti rumah, tanah, kesenian, kendaraan, polusi, dan permainan digunakan untuk membentuk cara pandang tertentu terhadap realitas sosial. Lirik tidak menerima begitu saja keadaan sebagai sesuatu

yang wajar, tetapi menggeser sudut pandang pendengar kepada pengalaman kelompok yang berada dalam posisi terdampak.

Perspektif Gramsci memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kritik dalam keempat lagu dapat dibaca sebagai bentuk *counter-hegemony*. Perlawanan tidak diwujudkan melalui seruan politik secara langsung, melainkan melalui upaya mengganggu penerimaan terhadap kondisi yang telah dianggap normal. Ironi, metafora, simbol budaya, dan humor digunakan untuk membuka jarak antara realitas yang dialami masyarakat dengan realitas yang dianggap wajar oleh wacana dominan.

Oleh karena itu, kekuatan kritik keempat lagu tidak hanya terletak pada keberanian membicarakan persoalan sosial, tetapi pada kemampuannya mengubah pengalaman sehari-hari menjadi pertanyaan mengenai struktur kekuasaan. Dari sini terlihat bahwa kritik Iwan Fals memiliki pola yang konsisten ketika terdapat pihak yang memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan arah perubahan, selalu muncul pertanyaan mengenai posisi masyarakat yang menerima dampaknya. Pola inilah yang kemudian menjadi dasar untuk membaca relevansi kritik tersebut terhadap perubahan relasi kekuasaan dari masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Prabowo.

3.4 Relevansi Wacana Kritik terhadap Kepemimpinan Pemerintahan Kontemporer

Relevansi kritik Iwan Fals tidak terletak pada kesamaan sistem politik antara Orde Baru dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan pada kemungkinan membaca kembali persoalan relasi kekuasaan dalam konteks politik yang berbeda. Pada masa Orde Baru, kekuasaan cenderung bekerja secara lebih terpusat melalui negara, birokrasi, dan kebijakan pembangunan dari atas. Sementara, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ruang partisipasi masyarakat lebih terbuka, terutama melalui media digital. Namun, keterbukaan ruang partisipasi tersebut tidak serta-merta menghilangkan perbedaan posisi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan(Aminuddin et al., 2025).

Relevansi pertama terlihat dalam relasi pembangunan dan masyarakat. ”Ujung Aspal Pondok Gede” memperlihatkan bagaimana keputusan mengenai pembangunan dapat mengubah ruang hidup masyarakat yang berada pada posisi lebih lemah. Pola persoalan tersebut dapat digunakan sebagai lensa untuk membaca pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam melihat hubungan antara kepentingan negara, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah kebijakan menunjukkan interaksi antara agenda pemerintah, perdebatan publik, dan tekanan opini di media sosial. BBC Indonesia mencatat bahwa sejumlah kebijakan mengalami pola serupa: diumumkan, menjadi viral di media sosial, kemudian ditinjau atau dibatalkan. Perbedaannya terletak pada konteks dan mekanisme pengambilan keputusan, tetapi pertanyaan analitis yang dapat diajukan tetap berkaitan dengan siapa yang menentukan arah pembangunan dan siapa yang menanggung konsekuensinya.

Relevansi kedua terlihat dalam posisi masyarakat terhadap pengambilan keputusan. ”Kuda Lumping” menggambarkan masyarakat yang berada dalam kondisi terdesak dan memiliki keterbatasan untuk menentukan keadaan yang mereka hadapi. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial dan berbagai kanal publik. Akan tetapi, kemampuan untuk berbicara tidak selalu identik dengan kemampuan untuk menentukan kebijakan. Masyarakat dapat menyampaikan kritik, membentuk opini, bahkan menciptakan tekanan publik, tetapi kewenangan formal untuk menetapkan kebijakan tetap berada pada institusi dan aktor yang memiliki otoritas.Dengan demikian, bentuk partisipasinya berubah,

tetapi persoalan mengenai seberapa jauh suara masyarakat dapat memengaruhi kekuasaan tetap menjadi pertanyaan penting.

Relevansi ketiga tampak pada ketimpangan dalam distribusi manfaat dan dampak pembangunan. "Sumbang" menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan pembangunan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama bagi setiap kelompok. Ada pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, sementara kelompok lain lebih banyak menerima dampak sosial maupun ekologisnya. Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pola persoalan tersebut dapat digunakan untuk membaca bagaimana kebijakan pembangunan mempertemukan kepentingan pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Sebagai contoh, rencana pemangkasan luas minimal rumah subsidi pernah memicu kritik luas karena dianggap berpotensi memengaruhi kelayakan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, kritik Iwan Fals dapat digunakan untuk melihat pembangunan bukan hanya dari keberhasilannya secara ekonomi, tetapi juga dari siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung bebannya.

Relevansi keempat berkaitan dengan politik sebagai arena perebutan kepentingan dan pembentukan opini. "Asik Nggak Asik" menggambarkan rakyat sebagai penonton dan suporter dalam permainan politik. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, posisi tersebut mengalami perubahan karena masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton. Media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, membentuk opini publik, dan memberikan tekanan terhadap pemerintah. Namun, perubahan ini sekaligus melahirkan bentuk baru pertarungan kekuasaan. Bukan hanya pemerintah yang berusaha membentuk wacana, tetapi masyarakat, media, kelompok kepentingan, dan berbagai aktor digital juga berusaha memengaruhi cara publik memahami suatu persoalan. Dengan demikian, arena kekuasaan menjadi lebih terbuka, tetapi sekaligus semakin kompleks.

Keempat pola tersebut menunjukkan bahwa kesinambungan yang ditemukan bukanlah keberlanjutan bentuk kekuasaan Orde Baru secara utuh, melainkan adanya persoalan relasi antara pihak yang memiliki kewenangan dan masyarakat yang berada dalam posisi terdampak. Jika pada masa Orde Baru persoalan tersebut banyak berlangsung melalui struktur negara, birokrasi, dan pembangunan yang bersifat *top-down*, maka dalam konteks pemerintahan kontemporer relasi tersebut berlangsung dalam arena yang lebih beragam, yaitu melalui kebijakan pemerintah, komunikasi politik, media, opini publik, dan ruang digital. Dengan demikian, yang dapat dibandingkan bukanlah kesamaan rezim, melainkan perubahan cara kerja dan arena berlangsungnya relasi kekuasaan.

Di sinilah ke empat lagu Iwan Fals menjadi relevan sebagai lensa kritis untuk membaca relasi kekuasaan dalam pemerintahan kontemporer. Relevansi tersebut tidak berarti bahwa persoalan yang digambarkan dalam lagu memiliki bentuk yang sama dengan kondisi politik saat ini. Sebaliknya, keempat lagu menyediakan kerangka pertanyaan untuk melihat bagaimana relasi antara kekuasaan dan masyarakat mengalami perubahan dalam konteks yang berbeda.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa hegemoni dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan perkembangan masyarakat dan media komunikasi. Pada masa Orde Baru, dominasi wacana lebih kuat ditopang oleh struktur politik, institusi negara, dan kontrol terhadap ruang publik. Sementara itu, dalam konteks kontemporer, pertarungan wacana berlangsung lebih terbuka dan melibatkan berbagai aktor di ruang digital. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang memproduksi wacana, tetapi tetap memiliki posisi strategis dalam membentuk narasi kebijakan dan memperoleh legitimasi publik.

Dalam kerangka Gramsci, kondisi tersebut menunjukkan bahwa *counter-hegemony* juga mengalami perubahan. Jika dahulu kritik dapat disuarakan melalui musik dan kebudayaan populer sebagai ruang alternatif, kini wacana tandingan dapat muncul melalui media sosial, komunitas digital, jurnalisme warga, dan berbagai bentuk ekspresi publik lainnya. Namun, keterbukaan ruang tersebut tidak otomatis menghapus hegemoni karena ruang digital juga menjadi arena perebutan pengaruh dan pembentukan konsensus.

Dengan demikian, karya Iwan Fals tidak digunakan untuk membuktikan bahwa pemerintahan kontemporer merupakan pengulangan Orde Baru. Sebaliknya, karya tersebut digunakan untuk melihat bagaimana persoalan relasi kuasa dapat bertahan, berubah, dan beradaptasi dengan konteks politik yang berbeda. Relevansi keempat lagu terletak pada kemampuannya menyediakan kerangka kritis untuk membaca relasi kekuasaan, bukan pada kesamaan situasi politik secara langsung. Yang berubah adalah bentuk dan arena kekuasaan; yang tetap relevan adalah pertanyaan mengenai siapa yang menentukan kebijakan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung dampak, dan bagaimana wacana tandingan dapat muncul.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap lagu "Ujung Aspal Pondok Gede", "Kuda Lumping", "Sumbang", dan "Asyik Nggak Asyik", penelitian ini menunjukkan bahwa kritik sosial Iwan Fals dibangun melalui strategi kebahasaan yang merepresentasikan persoalan dan relasi kekuasaan secara berbeda. Pada dimensi teks, "Ujung Aspal Pondok Gede" menggunakan diksi personal, personifikasi, dan pertentangan antara dusun dan kota untuk merepresentasikan hilangnya ruang hidup masyarakat akibat pembangunan. "Kuda Lumping" memanfaatkan simbol kesenian rakyat, ironi, dan pertanyaan retoris untuk menggambarkan keterdesakan masyarakat, penderitaan, serta marginalisasi kebudayaan. "Sumbang" menggunakan ironi, repetisi, dan personifikasi untuk mengkritik polusi serta memperlihatkan ketimpangan dalam distribusi dampak aktivitas ekonomi dan pembangunan. Sementara itu, "Asyik Nggak Asyik" menggunakan satire dan metafora permainan untuk menggambarkan politik sebagai arena perebutan kepentingan serta menempatkan rakyat pada posisi yang terbatas dalam menentukan arah permainan politik.

Analisis terhadap praktik diskursif dan praktik sosiokultural menunjukkan bahwa keempat lagu mengemas persoalan struktural melalui pengalaman sehari-hari, simbol budaya, dan bahasa yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Keterhubungan tematiknya memperlihatkan pola kritik yang bergerak dari penguasaan ruang hidup dan keterdesakan masyarakat menuju ketimpangan sosial-ekologis serta permainan kepentingan politik. Dalam kerangka Fairclough, temuan tersebut menegaskan bahwa bahasa dalam lirik tidak hanya menyampaikan pengalaman sosial, tetapi juga membentuk representasi mengenai pihak yang memiliki kewenangan menentukan keadaan dan pihak yang menanggung konsekuensinya. Perspektif hegemoni Gramsci memperdalam interpretasi ini dengan menunjukkan potensi keempat lagu sebagai wacana tandingan (*counter-hegemony*) yang mempertanyakan penerimaan terhadap ketimpangan dan dominasi sebagai keadaan yang wajar. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan pola kritik sosial melalui analisis komparatif empat lagu dengan menghubungkan strategi kebahasaan, praktik wacana, konteks sosiokultural, dan relasi kekuasaan dalam satu kerangka analisis.

Dalam kaitannya dengan tujuan ketiga, temuan penelitian menunjukkan bahwa keempat lagu dapat digunakan sebagai lensa kritis untuk mengkaji dinamika relasi antara negara dan masyarakat dalam konteks pemerintahan kontemporer Indonesia, termasuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Persoalan mengenai kewenangan dalam pengambilan keputusan, posisi masyarakat dalam kebijakan pembangunan, distribusi

manfaat dan dampak, serta pembentukan opini publik dapat menjadi titik berangkat untuk mengajukan pertanyaan kritis terhadap relasi kekuasaan masa kini. Namun, relevansi tersebut tidak membuktikan bahwa pola kekuasaan pada masa Orde Baru berlangsung secara identik dalam pemerintahan kontemporer. Lirik lagu merupakan objek analisis wacana dan sumber interpretasi kritis, bukan bukti empiris langsung mengenai kondisi pemerintahan saat ini. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa analisis wacana kritis Fairclough yang dipadukan dengan perspektif hegemoni Gramsci dapat digunakan untuk memahami bagaimana musik populer merepresentasikan ketimpangan sosial dan membuka ruang bagi kritik terhadap relasi kekuasaan, sekaligus menyediakan kerangka pertanyaan untuk membaca perubahan relasi tersebut lintas zaman.

Daftar Pustaka

Aminuddin, M., Suryaman, M., Sudiati, ;, & Efendi, A. (2025). REPRESENTASI IDEOLOGI DAN KEKUASAAN DALAM PIDATO PRESIDEN PRABOWO: ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH. *Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan Widyaparwa*, *53*(2). https://doi.org/10.26499/wdprw.v53i2.2264

Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. In *London: Longman.* . London: Longman.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Q. Hoare & G. N. Smith*. New York: International Publishers.

Hidayat, F. (2022). Gaya Bahasa Metonimia dalam Lirik Lagu Iwan Fals Bertema Kritik Sosial. *Deiksis*, *14*(3), 302. https://doi.org/10.30998/deiksis.v14i3.14253

iwan Fals. (1983). *Sumbang* [Video recording].

Iwan fals. (1991). *Kuda Lumping* [Video recording].

Iwan Fals. (2004). *Asik Nggak Asik* [Video recording].

Iwan fals. (2019). *Ujung Aspal Pondok Gede* [Video recording].

Kementerian Sekretariat Negara. (2025). *Optimalkan Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Terbitkan Inpres 8/2025*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Mayrudin, M. Y., & Nurul, H. Z. (2017). Construction of Ideological State Apparatus in the New Order Regime Against Communism in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, *2*(2), 113–122. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils

Pratikno. (1998). *KERETAKAN OTORITARIAMSME ORDE BARU DAN PROSPEK DEMOKRATISASI*.

Primasanti, M. A. (2017). Kritik sosial politik lagu-lagu Iwan Fals pada masa Orde Baru. *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah.*

Sembiring, J. (2013). Representasi Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia dalam Lirik Lagu Iwan Fals (Analisis Semiotika Lirik Lagu Iwan Fals yang Berjudul 'Ujung Aspal Pondok Gede.' *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*.

Susanti, W., & Nurmayani, E. (2020). *KRITIK SOSIAL DAN KEMANUSIAAN DALAM LIRIK LAGU KARYA IWAN FALS*.